

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka bisa disimpulkan bahwa :

Penetapan Kebijakan Pembangunan Taman Maju Bersama melalui Musrenbang berjenjang dari tingkat RT hingga Provinsi selanjutnya hasil himpunan aspirasi tersebut dituangkan dalam Draft RKPD, selanjutnya disepakati bersama eksekutif dan legislatif untuk fase alokasi anggaran dan menghasilkan KUA PPAS, untuk penetapan anggaran prioritas diproyeksikan dalam PPAS yang akan dituangkan dalam RKPD tahunan. Setelah besaran KUA PPAS disetujui oleh eksekutif dan legislatif ke tahap RAPBD lalu setelah disepakati, dilakukan pengecekan kembali, perbaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan BAPPEDA untuk ditetapkan atau validasi selanjutnya menjadi sebuah aturan daerah yang diimplementasikan berupa Peraturan Daerah yang berisikan APBD periode tersebut. Instansi yang berwenang dalam perumusan dan alokasi anggaran adalah Gubernur yang memberikan mandat kepada Tim TAPD yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, BAPPEDA, BAPPENDA, BPKD berfungsi menerjemahkan arahan dan ide perencanaan pembangunan serta perumusan alokasi anggaran dalam periode pemerintahannya.

Karena Kebijakan Pembangunan Taman Maju Bersama merupakan program yang termasuk dalam 23 janji kerja Gubernur Anies Baswedan berhak

mendapatkan anggaran prioritas 1, dan tertuang dalam RPJMD sehingga harus dan wajib direalisasikan pada periode pemerintahan tersebut. Terbukti berdasarkan proyeksi anggaran DKI Jakarta tahun 2018-2021 sektor lingkungan hidup selalu menduduki posisi 4 besar anggaran APBD. Untuk realisasi pengalokasian anggaran pembangunan Taman Maju Bersama oleh dinas terkait setelah tertuang dalam APBD dan RKPD Tahunan untuk direalisasikan, dituangkan dalam SKPD Dinas Pertamanan dan Kehutanan untuk membuat kegiatan tahunan dasarnya RPJMD dituangkan kedalam Renstra/Rencana Strategis, Dari renstra kita dilihat dan disesuaikan dengan target lalu dibagi dengan 5 tahun periode pemerintahan tersebut.

Pada saat proses penetapan kebijakan TMB kerap menimbulkan pro dan kontra antar fraksi terlebih dengan fungsi yang tidak jauh berbeda dengan kebijakan pertamanan sebelumnya yang ditakutkan malah terjadi pemborosan anggaran dan mangkraknya kebijakan pertamanan terdahulu, namun kesepakatan bersama menghasilkan realisasi kebijakan pembangunan TMB. Lalu dengan keberhasilan implementasi 100% dari target awal 86% serta berdasarkan survei populi kepuasan masyarakat paling tinggi posisi kedua terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 71,2. Sehingga dari implementasi tersebut secara tidak langsung meningkatkan citra Gubernur / pemenuhan aspek politik Gubernur Anies Baswedan itu sendiri dengan manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat DKI dan tergolong kebijakan yang populis.